

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sebulan DKI Harus Belanja Rp29,52 T

Memble, APBD Baru Terserap 60%

JAKARTA (Pos Kota) – Parah. Meski sisa masa tahun anggaran tinggal sebulan lagi, tetapi penyerapan masih memble. Hingga, Minggu (17/11), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta baru terserap sekitar 60 persen atau Rp48,33 triliun dari total anggaran belanja sebesar Rp77,85 triliun.

Artinya dalam kurun waktu tersisa Pemprov DKI Jakarta harus berbelanja sebesar Rp29,52 triliun. Memblenya serapan uang daerah itu tercantum dari situs resmi <http://publik.bapedadki.net>.

Rincian penyerapan anggaran belanja dibagi menjadi dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung, penyerapannya 54,76 persen atau Rp24,40 triliun dari alokasi anggaran Rp 44,56 triliun.

Belanja langsung isinya belanja barang dan jasa. Sementara itu, penyerapan belanja tidak langsung 71,87 persen atau Rp23,92 triliun dari alokasi anggaran Rp33,29 triliun.

Sementara belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lainnya. Dari data ini, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menduduki posisi terbawah dalam penyerapan anggaran.

Pertama, Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang baru menyerap anggaran 34,54 persen atau Rp1,33 triliun dari Rp3,87 triliun.

Kedua, Dinas Bina Marga baru menyerap anggaran 36,35 persen yakni Rp 1,36 triliun dari Rp3,76 triliun. Ketiga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru menggunakan Rp667 miliar dari alokasi dana Rp1,71 triliun. Jika dipersenkan maka baru menyerap 39,01 persen.

PROYEK BATAL

Gembong Warsono, anggota DPRD DKI Jakarta, menegaskan, rendahnya penyerapan anggaran dipastikan disebabkan batalnya sejumlah proyek pembangunan.

"Banyak program yang batal, kami minta agar tahun 2020 mendatang seluruh program yang sudah dirancang bisa berjalan sesuai dengan agenda, sehingga rakyat tidak dirugikan," kata Gembong, kemarin.

Menurut Gembong, rendahnya penyerapan akibat kinerja pejabat tidak maksimal. "Ukuran kinerja pejabat atau instansi jelas terlihat dari penyerapan anggaran yang sudah disusran secara matang di tahun lalu," katanya. (john/ruh/st)